

Editorial

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 4 No. 2, 2019 dapat terhidang kembali di hadapan pembaca dengan tema nasionalisme, demokrasi, dan identitas. Pemilihan tema ini didasarkan pada fenomena panggung politik baik di aras lokal maupun nasional yang diwarnai oleh nasionalisme, gagasan demokrasi, dan identitas yang semakin memudar. Setelah 74 tahun Kemerdekaan RI, orang mempertanyakan kembali, pentingnya identitas sebuah bangsa. Setelah 21 tahun sejak Reformasi 1998, orang membahas kembali, relevansi nasionalisme Indonesia di masa kini. Bagaimana tidak penting dan relevan? Meminjam konsepsi Taufik Abdullah, nasionalisme adalah wujud dialektika yang dinamis di mana setiap generasi mempunyai tantangan (*challenge*) dan jawaban (*response*) yang berbeda, tetapi esensinya tetap sama, yaitu rasa cinta yang dalam terhadap bangsa dan tanah air (Adisusilo, 2009: 3). Memasuki abad ke-21 misalnya, “Reformasi”, masih saja harus bergumul dengan berbagai corak ujian (Abdullah, 2016: 19), yang berujung pada tuntutan-tuntutan perubahan. Tuntutan perubahan yang semula di panggung politik, terus menyelinap ke seluruh aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Oleh karena itu, membincang nasionalisme Indonesia dengan dua aspek utama yang mengikutinya, yakni demokrasi dan identitas, akan selalu aktual.

Gagasan nasionalisme dan hubungannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan misalnya, menjadi fokus artikel *pertama* dari edisi ini, yakni karya R. Samidi dan Suharno yang berjudul “Mengurai Gagasan Tan Malaka Dari Perspektif Kajian Pendidikan Kewarganegaraan”. Menggunakan studi literatur, artikel ini menggali setiap gagasan-gagasan Tan Malaka di dalam buku *Gerpolek* sebagai objek kajian dan didukung dengan beberapa buku karya lainnya. Ia menunjukkan bahwa setiap gagasan revolusioner Tan Malaka ditinjau dari perspektif kajian Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi nyata dalam membangun relasi warganegara dan negara, baik itu dilihat dari konteks nasionalisme, ekonomi, politik, dan HAM. Senada dengan hal itu, artikel *kedua*, karya Susanto T. Handoko dan La Ode Hasirun, secara khusus mengkaji “Relasi Nasionalisme Etnik, Nasionalisme Negara, dan Nasionalisme Kewarganegaraan di Papua”. Artikel ini membahas dinamika relasi antara *ethnic* nasionalisme, *civic* nasionalisme dan *state* nasionalisme di Tanah Papua. Rakyat Papua merasa dimarginalisasi dan didiskriminasi dalam proses pembangunan baik bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya khususnya di masa pemerintahan Orde Baru telah menandai kelahiran kembali nasionalisme etnis dengan adanya tuntutan untuk merdeka. Dinamika politik lokal juga menunjukkan bagaimana elit-elit politik lokal memaknai reformasi politik nasional. Hal ini tampak pada artikel *ketiga*, karya Murid berjudul “Demokrasi dalam Ruang Hayal Bangsawan dan Birokrat-Politisi Maluku Utara.” Sebagai respon terhadap reformasi total sistem politik nasional, bangsawan dan birokrat-politisi Maluku Utara mendorong pembentukan Provinsi Maluku Utara. Mereka meresitasi sistem politik kesultanan yang diklaim bersifat demokratis menjadi sistem pemerintahan yang berlaku khusus di daerah.

Kebijakan politik ekonomi nasional melalui Revolusi Hijau juga berimbas pada keberlangsungan perdagangan dan pemasaran komoditas-komoditas tertentu di tingkat lokal. Hal ini secara khusus menjadi perhatian artikel *keempat*, Haryono Rinardi, dkk., yang berjudul “Dampak Revolusi Hijau dan Modernisasi Teknologi Pertanian: Studi Kasus pada Budi Daya Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Brebes”. Kajian ini menganalisis dampak implementasi salah satu program Revolusi Hijau, yaitu modernisasi teknologi, yang berimbas langsung pada peningkatan kesejahteraan petani. Dengan menggunakan model studi kasus, kajian ini membuktikan bahwa dampak program Revolusi Hijau tidak hanya terkait langsung dengan komoditas padi, tetapi juga pada komoditas bawang merah. Selain itu, argumentasi yang dibangun dalam kajian ini, yaitu adanya ketergantungan petani bawang merah pada satu jenis komoditas pupuk dan pestisida yang semakin kuat. Selain itu, terjadi pula perubahan sistem bagi hasil dalam budi daya pertanian bawang merah

yang lebih menekan kepada petani penggarap sebagai satu-satunya pihak yang paling besar menanggung risiko.

Di bidang kebudayaan, perubahan selera dan tidak adanya kebijakan politik yang dapat melindungi kelompok-kelompok seni pertunjukan tradisi telah mempengaruhi hidup matinya kelompok-kelompok seni tradisi di beberapa daerah. Namun demikian, beberapa lembaga pendidikan telah menunjukkan peranan yang signifikan untuk berkontribusi dalam mempertahankan dan melestarikan seni pertunjukan tradisi. Hal ini menjadi fokus perhatian artikel *kelima*, karya Dhanang Respati Puguh, dkk., berjudul “Peranan Perguruan Tinggi di Semarang dalam Pelestarian Wayang Orang Ngesti Pandowo.” Artikel ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Semarang telah berperan dalam pelestarian Ngesti Pandowo melalui berbagai kegiatan, seperti apresiasi seni, pengembangan manajemen, dukungan pemain, dan pemanfaatan teknologi.

Di tengah segala persoalan di atas, bangunan masyarakat Indonesia yang multikultur dan harmonis, tampak masih menjadi ciri yang menonjol. Hal ini setidaknya tampak pada artikel *keenam*, karya Meta Sya, dkk., berjudul “Tinjauan Historis Simbol Harmonisasi Antara Etnis Tionghoa dan Melayu di Kepulauan Bangka Belitung.” Berdasar penelusuran historis, artikel ini menyatakan bahwa berawal dari kedatangan Etnis Tionghoa di Bangka sebagai buruh tambang telah membentuk pembauran antara Etnis Tionghoa dan Melayu di Bangka. Pembauran itu dinyatakan dengan sikap solidaritas di antara keduanya yang berawal dari kedatangan bangsa kulit putih di Bangka. Peran sejarah menjadi alat yang sangat penting dalam membentuk simbol harmonisasi antara Etnis Tionghoa dan Melayu.

Menutup editorial ini, petikan Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 selayaknya direnungkan kembali. Ia menyatakan: “Kesinilah kita semua harus menuju, mendirikan satu *Nationale staat*, di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan “golongan kebangsaan” (Tim Panitia Kongres Pancasila IX, 2018: 16). Soekarno, dan para *founding fathers* kita telah menggagas sebuah konsep negara-bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, dan golongan. Menjadi tugas kita bersama untuk mempertahankan kebangsaan Indonesia itu dengan sekuat-sekuatnya, se hormat-hormatnya. Selamat membaca.

Referensi:

- Abdullah, T. (2016). “Historiografi dalam Denyut Sejarah Bangsa”, *Kalam* 18.
- Adisusilo, S. (2009). “Nasionalisme – Demokrasi – *Civil Society*”, *Historia Vitae*, Vol. 23, No. 2.
- Tim Panitia Kongres Pancasila IX (2018). *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press dan Anggota Ikapi.

Rabith Jihan Amaruli